



Pengaruh Transparansi Terhadap Perkara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya

Fathya Kamila¹, Muhammad Rizal², Tetty Herawati³, Dodi sukmayana⁴

Universitas Padjadjaran^{1,2,3}

Universitas Winayamukti⁴

fayhya18002@mail.unpad.ac.id

muhamad.rizal@unpad.ac.id ,

tetty@unpad.ac.id

dodisukma33813@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi merupakan badan usaha yang terbentuk dari perorangan maupun badan hukum yang aktivitas di dalamnya dijalankan atas prinsip koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Transparansi akan memudahkan pihak – pihak berkepentingan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja dari koperasi. Akuntabilitas akan meningkatkan kinerja koperasi sebab berbagai hasil kerja yang dibuat mampu dipertanggungjawabkan dengan baik. Independensi akan membuat perusahaan bisa lebih objektif dalam membuat keputusan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kinerja Koperasi di Indosurya mengalami banyak ketidak stabilan dikarenakan kasus yang ada. Dalam tata kelola perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Transparansi akan memudahkan pihak – pihak berkepentingan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja dari koperasi. Akuntabilitas akan meningkatkan kinerja koperasi sebab berbagai hasil kerja yang dibuat mampu dipertanggungjawabkan dengan baik. Responsibilitas dimana sebuah perusahaan mampu menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Independensi akan membuat perusahaan bisa lebih objektif dalam membuat keputusan.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas.

ABSTRACT

Cooperatives are business entities that are formed from individuals and legal entities that are carried out on the principles of cooperatives based on the principle of kinship. Transparency will make it easier for interested parties in assessing and evaluating the performance of cooperatives. Accountability will improve the performance of cooperatives because the various work results made can be answered well. Independence will make the company more objective in making decisions. In this study it was found that the performance of cooperatives in Indosurya experienced a lot of incompleteness due to existing cases. In the national economic governance compiled as a joint effort based on the principle of family and economic democracy. Transparency will make it easier for interested parties in assessing and evaluating the performance of cooperatives. Accountability will improve the performance of cooperatives because the various work results made can be answered well. Responsibility in which a company is able to carry out company activities in accordance with applicable rules. Independence will make the company more objective in making decisions.

Keywords: Transparency, Accountability, Responsibility.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan badan usaha yang terbentuk dari perorangan maupun badan hukum yang aktivitas di dalamnya dijalankan atas prinsip koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Dalam pendiriannya, koperasi memiliki fungsi dalam upaya membangun, dan mengembangkan ekonomi anggotanya secara khusus dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek sosial maupun ekonomi secara umum. Kinerja koperasi merupakan tolak ukur dari tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan pihak koperasi. Kinerja diambil dari kata Job Performance yang diibaratkan sebagai prestasi dari kerja yang telah dilakukan. Melihat hal tersebut, pengukuran kinerja koperasi dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan para pihak yang berkepentingan dalam menilai sebuah hasil kerja yang dilakukan koperasi dalam mencapai sebuah visi misi ataupun target perusahaan.

Kinerja koperasi yang selama ini terlihat baik, mulai tercoreng ketika muncul kasus gagal bayar yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Kasus ini disebabkan karena seorang anggota yang memiliki dana cukup besar hendak menarik kembali uangnya. Dalam usaha pencairan tersebut KSP Indosurya mengalami mismatch. Hingga langkah akhir yang diambil kasus ini terpaksa dilimpahkan ke pengadilan. Dari total nasabah 933 orang, banyak yang belum mendapatkan ganti rugi bahkan ada yang terhenti mendapatkan dananya hingga saat ini.

Saat ini semakin marak kasus penipuan berkedok koperasi dan tidak sedikit kasus penipuan koperasi yang terjadi di Indonesia, Adapun hasil dari pengusutan kasus ini juga tidak membuahkan ending yang baik, beberapa kasus penipuan berkedok koperasi yang dengan kerugian triliunan Rupiah, yang pernah terjadi di Indonesia yaitu Koperasi Langit Biru (KLB), Koperasi Cipaganti, Koperasi Pandawa, dan Indosurya. Ekonomi CORE Indonesia sekaligus Dosen Perbanas Institute, Piter Abdullah Redjalum, mengungkapkan berulangnya kasus penipuan berkedok koperasi disebabkan beberapa faktor. Pertama, karena setiap kasus tidak diinvestigasi dan diungkap secara tuntas kepada masyarakat untuk dijadikan pembelajaran.

Faktor kedua adalah lemahnya pengaturan dan pengawasan koperasi. Harus diakui bahwa selama ini Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi koperasi tidak punya kapasitas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap koperasi secara komprehensif. Setidaknya dilihat dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur pengawasan yang dimiliki Kementerian Koperasi. Ketiga, maraknya penipuan berkedok koperasi terjadi karena sudah banyak masyarakat yang mulai meninggalkan badan usaha atau organisasi ini. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak terlalu paham akan manfaat, fungsi, jenis, hingga peran koperasi.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang koperasi menjadikan para pelaku penipuan sangat mudah melancarkan kejahatan mereka, untuk mewujudkan koperasi sebagai tonggak perekonomian nasional perlu digalakkan kembali gerakan koperasi. Pengurus koperasi selain harus memiliki kredibilitas, integritas dan kompetensi, juga harus memiliki jiwa koperasi. Di sisi lain, anggota dan calon anggota koperasi juga harus terus diedukasi tentang fungsi dan peran koperasi sehingga bisa memahami bahwa koperasi bukan tempat melampiaskan nafsu keserakahan. Investasi berisiko dengan iming-iming keuntungan tinggi jelas bukan produk koperasi. Kementerian Koperasi dan UMKM harus memperkuat pengaturan dan pengawasan untuk meminimalisir penipuan berkedok koperasi ini. Jika ada sebuah kasus juga harus diselesaikan secara tuntas dan komprehensif.

PT. Indosurya Disebut sebagai kasus penipuan terbesar di Indonesia ini lantaran nilai penggelapan koperasi ini mencapai Rp 106 triliun. PT Indosurya yaitu perusahaan yang bergerak dalam menyediakan fasilitas pembiayaan keuangan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. KSP Indosurya pertama kali didirikan di Jakarta pada 27 September 2012,

beralamat di Jl MH Thamrin No 03 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Saat beroperasi, secara ideal KSP Indosurya merupakan penyedia pinjaman untuk membantu anggota yang memerlukan modal dalam pengembangan usaha. Pendanaan dihimpun dari dana para anggota, yang nanti akan disalurkan kembali kepada anggota. Himpunan tersebut disebut juga sebagai simpanan, penawaran yang mereka tawarkan yaitu penawaran produk bunga 8-12%/ tahun.

Permasalahan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) IndoSurya sudah mulai tercium sejak tahun 2018. Saat itu, Kementerian Koperasi pernah memberikan sanksi administratif kepada Indosurya karena dugaan penyimpangan. Penyebab utama dikeluarkan sanksi tersebut karena Indosurya tidak menyerahkan laporan keuangan dan Rapat Anggota Tahunan 2019, yang mana menurut peraturan harus diserahkan pada kuartal ke 1 2020, Kasus ini telah berjalan berlarut-larut hingga menyita perhatian publik. saat ada nasabah yang menerima surat pemberitahuan bahwa dana yang mereka ditempatkan di deposito tidak bisa dicairkan, Seiring dengan berjalannya waktu, muncul pula kabar mengenai gagal bayar KSP Indosurya dan KSP ini telah masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

KAJIAN PUSTAKA

Transparansi

Transparansi adalah kejujuran dan keterbukaan sehingga tersusun akuntabilitas yang pada umumnya dianggap sebagai dua pilar utama tata kelola perusahaan yang baik, perihal inilah implikasi dari transparansi adalah bahwa semua tindakan organisasi harus cukup teliti untuk mendapatkan pengawasan publik. Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli terkait konsep transparansi. Menurut Adrianto (2007), transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Menurut Bappenas RI dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.

Jenis Transparansi

Konsep transparansi bukan hanya penting dalam pemerintahan, tapi dalam bisnis transparansi juga sangat penting. Tanpanya, akan muncul titik buta yang tak terelakkan yang menyebabkan masalah atau keterbatasan pada tujuan yang ingin kita capai. Beberapa jenis Transparansi :

1. Transparansi pada diri sendiri

Transparansi penuh dimulai dari diri sendiri, Jika diri sendiri tidak jujur dengan diri sendiri tentang kemampuan, prioritas, dan tujuan perusahaan, tidak dapat mengharap orang lain melakukannya.

2. Transparansi pada orang lain

Transparansi pada orang lain juga berarti memberi tahu orang-orang di sekitar saat merasa tidak nyaman dan saat membutuhkan dukungan. Banyak pengusaha merasa itu tugas mereka untuk memiliki semua jawaban. Namun, untuk menjadi sukses, penting untuk secara transparan meminta bantuan atau nasihat saat kita membutuhkannya.

3. Transparansi pada Bisnis

Sebagai pemimpin harus bertanggung jawab untuk melacak metrik dan keuangan utama setiap hari. Setelah memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana bisnis beroperasi, pebisnis dapat melanjutkan dengan menilai dengan jujur di mana pebisnis perlu melangkah maju dan siapa yang dapat membantu untuk mencapai hasil yang dibutuhkan. Selalu pastikan tim memahami keadaan perusahaan – tidak peduli seberapa buruk tampilannya. Tidak ada hal besar yang bisa dicapai dengan menyembunyikan masalah. Jika pebisnis mengkhawatirkan aspek tertentu dari bisnisnya, pebisnis harus memberi tahu tim yang lain. Semakin banyak informasi yang mereka miliki, semakin banyak mereka dapat membantu. Sebaliknya, ketika tim memahami bahwa mereka memainkan peran penting dalam kesuksesan perusahaan, pebisnis dapat meminta pertanggungjawaban satu sama lain untuk tujuan bersama.

Prinsip Transparansi

Dalam konteks pemerintahan, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator yang meliputi:

- Adanya sistem yang terbuka dan standarisasi yang jelas serta mudah dipahami dari seluruh proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
- Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik yang berkaitan dengan proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan Transparansi

Adapun beberapa tujuan dari adanya penerapan sistem transparansi, antara lain;

- Mendorong terciptanya proses komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal
- Mampu untuk memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan
- Meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan-keputusan
- Mampu untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan.

Jensen dan Meckling (1976) memaparkan bahwa keterkaitan antara teori keagenan mengajarkan tentang jalinan kerjasama kontrak yang terbentuk antara principal dengan agen. Menurut Zarkasyi (2018), Good Corporate Governance merupakan seperangkat sistem dari awal (input), proses, sampai akhir (output) dan sistem aturan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) demi tercapainya tujuan perusahaan. Menurut Zarkasyi (2018), perusahaan berkewajiban melakukan penyediaan informasi yang berkaitan dengan upaya pengambilan keputusan, dimana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka dan informasi yang tersedia harus mudah dijangkau oleh para pihak yang memiliki kebutuhan akan hal tersebut. Menurut Zarkasyi (2018), responsibility merupakan sebuah keharusan yang dilakukan perusahaan untuk taat akan peraturan perundang – undangan yang ada dan bertanggung jawab akan segala bentuk tindakan yang dilakukan kepada masyarakat dan lingkungan hingga nantinya terbentuk dan terjadi kesinambungan usaha yang berlaku jangka panjang.

Transparansi akan memudahkan pihak – pihak berkepentingan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja dari koperasi. Transparansi akan membuat perusahaan mengambil keputusan dengan mudah demi membantu pencapaian tujuan dengan lebih cepat.

Akuntabilitas (accountability) adalah sebuah keadaan dimana perusahaan mampu mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang mereka buat. Akuntabilitas (accountability) merupakan sebuah keadaan dimana terbentuk sebuah sistem pengendalian yang baik didalam perusahaan sehingga tercipta sebuah keseimbangan kekuasaan. Akuntabilitas akan meningkatkan kinerja koperasi sebab berbagai

hasil kerja yang dibuat mampu dipertanggungjawabkan dengan baik.

Responsibilitas dimana sebuah perusahaan mampu menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Responsibilitas akan membantu perusahaan terhindar dari berbagai tindakan menyimpang sebab semua kegiatannya dilakukan atas pertimbangan peraturan dan prosedur yang berlaku. Responsibilitas akan membantu perusahaan terhindar dari berbagai bentuk penyelewengan tindakan yang dapat merugikan pihak – pihak lain sehingga kinerja mereka akan terlihat semakin baik.

Independensi adalah keadaan dimana perusahaan terbebas dari berbagai bentuk pengaruh yang berasal dari luar dalam upaya mengambil keputusan. Independensi akan membuat perusahaan bisa lebih objektif dalam membuat keputusan. Dalam hal ini Independensi akan membantu perusahaan terhindar dari berbagai bentuk kekuasaan sepihak (mendominasi) dan intervensi dari pihak lain yang dapat berdampak buruk pada kinerja koperasi.

Kewajaran merupakan suatu keadaan dimana perusahaan mampu bertindak secara adil, tidak memihak, setara dan wajar dalam melakukan tindakan demi memenuhi kepentingan stakeholders. Kewajaran ini akan menimbulkan rasa keadilan dari para stakeholders sehingga mengurangi kemungkinan perkelahian atau ketidakcocokan hubungan dalam perusahaan sehingga kinerja koperasi semakin baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono bahwa metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data mendalam yang mengandung makna, makna dalam hal ini adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Sugiyono, 2013). tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Indosurya merugikan 23.000 ribu korban dengan nilai total kerugian hingga Rp 106 Triliun. Nilai ini menjadikan Indosurya sebagai kasus dengan nilai penggelapan terbesar di Indonesia. Pada mulanya kasus ini muncul dikarenakan beberapa nasabah mengeluhkan tidak bisa menarik simpanan pokok dan imbal hasil yang dijanjikan KSP Indosurya. Saat itu Indosurya memberi syarat nasabah baru bisa mencairkan uang dalam jangka waktu 6 bulan sampai dengan 4 tahun tergantung nilai Asset Under Management (AUM). Beberapa nasabah kemudian mulai membongkar permainan di KSP Indosurya. Salah satunya adalah status mereka yang menanamkan uang di KSP Indosurya. Ternyata untuk menjadi anggota KSP Indosurya para peserta harus menyetor simpanan wajib sebesar Rp 20.000.000 dan simpanan pokok sebesar Rp 500.000 setiap bulan. Selain itu, KSP Indosurya juga diduga memanipulasi informasi produk investasi yang dibuat seolah-olah menyerupai deposito kepada peserta guna menarik nasabah. Padahal mereka berbentuk koperasi bukan investasi.

Penanganan permasalahan KSP Indosurya dinilai seharusnya diselesaikan dengan prosedur koperasi terlebih dulu supaya anggota tidak dirugikan, seperti yang diungkapkan salah satu pengamat koperasi Ia menilai ada kesalahan mendasar dalam penanganan perkara koperasi-koperasi yang sedang bermasalah, yaitu dengan tidak mendudukan masalah secara hukum koperasi terlebih dahulu dan apabila ada masalah pada pengelolaan, seharusnya diganti pengurusnya dan diatasi masalahnya.

Transparansi sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja koperasi, transparansi dapat menjamin bahwa seluruh data perusahaan dapat diakses dan diketahui oleh para pihak berkepentingan untuk mengambil keputusan. Akuntabilitas juga turut diperhatikan dalam upaya peningkatan kinerja koperasi. Apabila dianalogikan, jika prinsip transparansi tidak dilaksanakan oleh Koperasi tsb, maka bagaimana nasabah dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelayanan yang ada di koperasi dan Sebaliknya, apabila nasabah tidak dapat mengawasi pelayanan koperasi, maka bagaimana prinsip transparansi tersebut dapat terwujud, Sampai pada akhirnya berdampak pada hilangnya kepercayaan nasabah. Keterbukaan koperasi sejatinya merupakan bentuk transparansi yang berimplikasi pada kemampuan dalam mewujudkan good

governance. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan informasi mengenai aturan main serta rincian bentuk kegiatan pelayanan publik secara jelas sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan pemerintah tersebut secara langsung. Selain itu, dengan adanya keterbukaan koperasi dan transparansi dapat membentuk suatu *check and balance* dan mempermudah nasabah untuk mengetahui tindakan yang rasional sebagai kontrol sosial dengan membandingkan sistem nilai yang ada.

Pada era modern ini, masyarakat memiliki kebebasan dalam bertindak dan bernegara dengan keterbukaan informasi publik melalui berbagai kanal. Positifnya adalah masyarakat saat ini dapat aktif dan kritis dalam mengawasi perilaku pemerintah yang diwujudkan secara halus dalam dialog publik maupun demonstrasi. Meskipun, tidak serta merta partisipasi harus dilakukan secara anarkis. Masyarakat perlu memahami pula tentang sikap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam melakukan pengawasan pada pelayanan publik. Maka perlu dipahami bersama bahwa transparansi dan partisipasi sangat berkaitan erat. Namun, untuk mewujudkannya, perlu kerja sama yang baik antara Pihak Koperasi atau Organisasi lain sebagai penyelenggara dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Dengan kata lain, belum tentu semakin tinggi partisipasi nasabah menunjukkan semakin rendah transparansinya. Bahkan, apabila partisipasi nasabah tinggi, maka menunjukkan bahwa Koperasi atau Organisasi lain mewujudkan transparansi yang baik karena nasabah dapat menjalankan kewajibannya untuk terlibat dalam mengawasi dan mengevaluasi pelayanan yang dirasa kurang optimal serta terwujudnya *welfare state*. Untuk membentuk sinergitas tersebut, maka perlu upaya pemberdayaan kepada nasabah atau client dan membangkitkan kesadaran tentang pentingnya informasi dalam mengawasi pelayanan yang dijalankan Koperasi KSP Indosurya atau Organisasi Bisnis yang lain.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan khususnya dalam penelitian ini pihak koperasi kepada anggotanya, membuktikan bahwa kinerja mereka baik sehingga terbentuk sistem saling mengawasi antara anggota dengan pihak koperasi. Responsibilitas keadaan dimana perusahaan harus mengikuti dan taat pada aturan undang – undang. Independensi sangat berkaitan dengan kinerja koperasi. Independensi merupakan situasi dimana perusahaan tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam upaya mengambil keputusan. Kewajaran adalah keadaan dimana perusahaan harus memberikan perhatian pada kepentingan pihak – pihak yang memiliki keterkaitan dengan perusahaannya.

Berdasarkan data yang ada kinerja koperasi dapat disebabkan oleh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. transparansi yang ada di Indosurya menunjukkan hubungan yang negatif dengan kinerja koperasi, merupakan sebuah kondisi dimana perusahaan sangat tidak terbuka mengenai berbagai informasi yang diperlukan oleh pihak – pihak yang berkepentingan.

akuntabilitas indosurya memiliki ikatan negatif terhadap kinerja koperasi tersebut. Akuntabilitas (*accountability*) merupakan sebuah keadaan dimana sebuah sistem pengendalian yang tidak baik didalam perusahaan sehingga terjadi ketidak keseimbangan kekuasaan yang ada di perusahaan tersebut. Akuntabilitas yang ada di indosurya tidak meningkatkan kinerja koperasi sebab berbagai hasil kerja yang dibuat tidak mampu dipertanggungjawabkan dengan baik.

responsibilitas terhubung secara negatif terhadap kinerja, Responsibilitas yang ada di Indosurya tidak membantu perusahaan terhindar dari berbagai tindakan menyimpang sebab semua kegiatannya tidak dilakukan atas pertimbangan peraturan dan prosedur yang berlaku. Responsibilitas yang ada di perusahaan Indosurya bisa dikatakan tidak baik yang mengakibatkan tindakan yang merugikan pihak – pihak lain sehingga kinerja mereka akan terlihat semakin buruk.

independensi berkaitan secara negatif terhadap kinerja koperasi, Independensi yang baik akan membuat perusahaan bisa lebih objektif dalam membuat keputusan tetapi dalam kasus indosurya, perusahaan tidak bisa membuat keputusan yang baik sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami berbagai bentuk kekuasaan sepihak (*mendominasi*) dan intervensi dari pihak lain yang dapat berdampak buruk pada kinerja koperasi.

kewajaran memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja karyawan, Kewajaran yang ada di perusahaan Indosurya ini menimbulkan rasa tidak adil dari para karyawan maupun stakeholders lain sehingga menimbulkan didalam perusahaan sehingga kinerja koperasi semakin buruk dan hancur.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya oleh peneliti, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mengacu pada pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan peneliti. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kinerja Koperasi di Indosurya mengalami banyak ketidak stabilan dikarenakan kasus yang ada. Karyawan Koperasi yang diharapkan bekerja sesuai dengan pedoman koperasi dan menerapkan asas tanggung jawab serta kejujuran juga tidak terealisasi dikarenakan adanya kasus tsb sehingga karyawan yang ada tidak bisa berbuat apa-apa bahkan karyawan pun sangat dirugikan oleh perusahaan.

Dari sisi prinsip Transparansi, dapat dikatakan bahwa kasus Indosurya tidak memenuhi standar Transparansi yang diharapkan. Sebagai investor, penting untuk selalu memeriksa reputasi perusahaan sebelum melakukan investasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan perusahaan, memeriksa track record perusahaan, dan memeriksa pengalaman investor lain yang pernah berinvestasi di perusahaan tersebut. Perusahaan sangat tidak terbuka mengenai Kinerja atau Permasalahan yang ada di Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Naibaho, M. (2020). Penerapan Penilaian Kinerja Karyawan pada PT Indosurya (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam).
- Koto, S. E. J. (2020). Pengalihan Kreditur Melalui Cessie Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Erdawati, L., & Mujamil, I. (2019). Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indosurya Daya Sukses. Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu), 1.
- Zhadira, G. R., & Sumiyati, Y. (2021). Restrukturisasi Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Solusi Koperasi yang Terdampak Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan UU Kepailitan PKPU Dan Keberlangsungan Usaha Koperasi.
- Wiguna, B. A., & Sumiyati, Y. (2022, January). Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam Kepada Masyarakat (Menurut UU Cipta Kerja & PP No. 7 Tahun 2021). In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 208-214).

